

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi lingkungan, perekonomian dan masyarakat. Sebagai paru-paru dunia, hutan tidak hanya menyediakan oksigen dan menjaga keseimbangan ekologi, namun juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak spesies, termasuk manusia. Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan, Dinas Kehutanan mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan sumber daya alam tersebut dikelola secara bijaksana dan lestari. aspek kunci dari inisiatif ini adalah pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan yang baik di Dinas Kehutanan sangat penting agar dana publik yang dikelola dapat digunakan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab serta memberikan dampak nyata terhadap perlindungan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan program kehutanan seperti konservasi, penghijauan, dan mitigasi perubahan iklim. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk kelangsungan hidup mereka (Zada et al., 2021).

Oleh karena itu, pengalokasian sumber daya anggaran harus mempertimbangkan kepentingan bersama melalui program perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik memastikan bahwa dana yang dialokasikan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan sektor publik, termasuk administrasi kehutanan, sering kali berisiko menimbulkan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya.

Situasi ini semakin diperburuk dengan rumitnya pengelolaan dana yang berasal dari anggaran nasional serta donor internasional yang mendukung proyek kehutanan

berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan penggunaan dana. Sementara itu, permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan kini telah menjadi isu global. Dukungan internasional terhadap proyek-proyek kehutanan oleh organisasi-organisasi dunia seperti PBB dan Bank Dunia semakin menekankan pentingnya standar akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan. Kepatuhan terhadap peraturan, standar akuntansi dan transparansi pelaporan keuangan merupakan persyaratan utama untuk menjaga kepercayaan dan melanjutkan dukungan ini.

Tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tergantung pada berbagai faktor, termasuk sejauh mana lembaga ini menerapkan prinsip akuntabilitas publik dan terbuka dalam pelaporan keuangannya. Transparansi dapat dinilai dari publikasi laporan keuangan yang mudah diakses, kejelasan alokasi anggaran, serta adanya mekanisme audit yang independen (Rizal & Siskawati, 2022). Jika pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran digunakan, apakah sesuai dengan perencanaan, dan seberapa efektif penggunaannya untuk program-program kehutanan.

Tuntutan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana masyarakat juga semakin meningkat kesadaran akan pentingnya perlindungan hutan, kritik masyarakat terhadap cara anggaran pemerintah dialokasikan untuk program kehutanan pun meningkat. Kegagalan untuk memenuhi tanggung keuangan dapat berdampak negatif terhadap reputasi Dinas Kehutanan dan melemahkan kepercayaan masyarakat.

Sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi membantu Dinas Kehutanan memahami pengeluaran secara real-time dan memungkinkan pelaporan dan audit keuangan lebih akurat. Pengenalan teknologi diharapkan dapat lebih meningkatkan transparansi dan

efisiensi pengelolaan keuangan. Secara keseluruhan, akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Kehutanan memastikan bahwa kepercayaan masyarakat tetap terjaga, dana digunakan secara efektif, dan hasil nyata dicapai dalam upaya melestarikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zada et al., 2021) . Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan dinas kehutanan” sebagai judul dalam tugas akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan sejauh mana penerapan teknologi informasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penulisan

Memahami dan menganalisis proses pengelolaan keuangan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan, serta mengevaluasi tingkat transparansi dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Melalui kegiatan ini, penulis dapat mempelajari sistem pengawasan keuangan dan penerapan teknologi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dana publik, sekaligus mengaplikasikan pengetahuan teoritis akuntansi ke dalam praktik nyata di sektor pemerintahan.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

- a. Memperoleh pengetahuan dan wawasan di dunia kerja
- b. Melatih diri untuk terbiasa mengikuti kedisiplinan perusahaan, iklim kerja

2. Bagi Pembaca

Memberikan perspektif yang lebih nyata mengenai apa yang akan di peroleh

dari program magang.

3. Bagi Universitas

Sebagai jembatan penghubung antara Perguruan Tinggi dengan dunia kerja.

1.5 Metode Penulisan

Metode magang yang dilakukan adalah menganalisis pengelolaan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

a. Penelitian Lapangan

Metode Pertama yang dilakukan penulis yaitu, melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan secara bertahap dan terstruktur. Penulis juga melakukan pengamatan dan mengumpulkan dokumen dokumen yang terjadi di lapangan agar penulis mendapatkan informasi lebih lanjut.

b. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data kedua yaitu dengan mengumpulkan informasi referensi materi materi dari berbagai sumber buku dan informasi dari artikel yang terkait untuk menyelesaikan masalah yang terkait untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penulis.

1.6 Tempat Dan Waktu Magang

Tempat yang sesuai dengan latar belakang dan masalah yang akan dibahas adalah pada Dinas Kehutanan Jln. Raden Saleh No. 8A Padang Kota Padang, Sumatera Barat sebagai tempat untuk melaksanakan kuliah kerja Praktek lapangan atau magang dengan waktu pelaksanaan berlangsung selama 40 hari kerja.

1.7 Sistematika Penulis

Agar dapat lebih fokus pada hal utama yang telah diajukan, maka penulis memberikan sistematika sesuai pembahasan. Sistematika tersebut adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan tempat dan waktu, serta sistematika penulisan, manfaat penelitian dan tempat dan waktu, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan landasan teori yang didalamnya terdapat tentang determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menggambarkan mengenai Dinas Kehutanan, Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Bab IV Pembahasan

Bab ini adalah bagian yang menggambarkan hasil atau data yang didapat oleh penulis selama melakukan penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini terdapat kesimpulan dari laporan hasil pengamatan selama magang beserta dengan saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai masukan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

